

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atqia, M. R., Fathoni, N., & Hidayat, A. (2019). Manajemen Pembiayaan Madrasah. *Tadbir Muwahhid*, 3(2), 195-203.
- Cheisviyanny, C. (2015). Analisis Pelaksanaan Fungsi Bendahara Pemerintah Daerah Sebagai Pemungut PPN dan PPh Pasal 22 di Provinsi Sumatera Barat (Studi Kasus pada CV LPM, Distributor Motor Roda Tiga). *Infestasi*, 11(1), 11-20.
- Fitriani, A. N., Mahriani, R., & Meilinda, N. (2019). Peran Humas dalam Mempertahankan Citra Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang. *Doctoral Dissertation, Sriwijaya University*.
- Harjowiryono, M. (2019). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Bendahara Pemerintah dalam Penyetoran Pajak. *Indonesia Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(3), 195-217.
- MAN 1 Kuningan. (n.d.). *Sejarah Singkat MAN 1 Kuningan*. Diakses pada 30 April 2022 dari <https://man1kuningan.sch.id/read/3/sejarah-singkat>
- MAN 1 Kuningan. (n.d.). *Visi dan Misi MAN 1 Kuningan*. Diakses pada 30 April 2022 dari <https://man1kuningan.sch.id/read/9/visi-dan-misi>
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indoneisa.
- Pajak, D. J. (2016). *Bendahara Mahir Pajak*. Jakarta Selatan: Direktorat Peraturan Perpajakan II.
- Pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-05/PJ.09/2010 Tentang Kewajiban Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Melakukan Pemotongan/Pemungutan Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Prabandaru, A. (n.d.). *3 Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Diakses pada 29 Desember 2021 dari <https://klikpajak.id/blog/3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>

Perbendaharaan, D. J. (2009). *Petunjuk Operasional Aplikasi GPP 2009*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Ramansyah, A. G. (2021). *Tinjauan atas Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Oleh Bnedaharawan MAN 1 Banyuasin*. Tangerang Selatan: Politeknik Keuangan Negara STAN.

Sakdiah, R. A. (2018). *Prosedur Perhitungan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Jember*. Jember: Universitas Jember.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Wahyuni, W. (2016). Analisis Pemahaman dan Kesadaran Bendahara Pemerintah terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di UIN Alauddin Makassar). *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.